

Rancangan Rencana Strategis PMI Tahun 2024-2029

VISI

“TERWUJUDNYA ORGANISASI DAN PELAYANAN PMI YANG PROFESIONAL, BERSINERGI, DAN BERKELANJUTAN”

Profesional	Organisasi dan pelayanan PMI dikelola untuk memberikan layanan kemanusiaan yang berkualitas dengan personil yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Sistem dan prosedur disusun dengan jelas, terukur dan terus dikaji untuk memastikan efektifitas layanan yang berkelanjutan. PMI berkomitmen pada akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan transparansi informasi terkait kegiatan dan hasil kerja yang dicapai.
Bersinergi	<p>PMI menjalin kemitraan yang erat dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, mencakup kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.</p> <p>Setiap unit di PMI berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta berkolaborasi untuk mencapai layanan kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan.</p>
Berkelanjutan	Program PMI dirancang dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan adaptif untuk menjaga lingkungan dan memastikan keberlangsungan layanan. Dengan mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi, kapasitas organisasi terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis, serta menghadapi kompleksitas layanan kemanusiaan.

MISI

1. **Memperluas jangkauan layanan PMI yang inklusif melalui penerapan standar pelayanan minimal menuju ketahanan masyarakat yang progresif.**

Sebagai upaya menghadapi tantangan layanan kemanusiaan yang semakin kompleks, PMI berupaya menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak bencana, kedaruratan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya berdasarkan pemetaan potensi kedaruratan dan kebutuhan yang terpercaya, serta memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak, dan memastikan layanan kemanusiaan yang diberikan mudah diakses oleh semua orang.

Penerapan standar pelayanan minimal mencakup ketersediaan, kualitas, reponsivitas dan akuntabilitas layanan sehingga dapat menjamin kualitas hidup masyarakat terutama saat kondisi kedaruratan, meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap PMI, serta membentuk masyarakat yang mandiri dan tangguh untuk mampu menghadapi berbagai tantangan (bencana alam, konflik sosial, krisis kesehatan, dan perubahan iklim), terus belajar dan berkembang serta aktif berpartisipasi dalam membangun ketahanan masyarakat yang progresif.

Misi pertama ini, secara spesifik mengacu pada amanat Pasal 22, butir a, b, f, g, h, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan Strategis 1-3.

2. **Memperkuat reputasi organisasi melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menuju organisasi kemanusiaan yang terpercaya**

PMI sebagai organisasi kemanusiaan terbesar dan menjadi satu-satunya organisasi penyelenggara Kepalangmerahan di Indonesia, berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, melalui publikasi informasi terkait kegiatan, keuangan, dan hasil kerja, serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai tahap program. **Penerapan tata kelola organisasi yang baik akan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatannya.** Hal ini sejalan dengan misi PMI untuk menjadi organisasi yang dipercaya oleh masyarakat dan publik dalam memberikan layanan kemanusiaan, dan mendorong partisipasi publik untuk terlibat sebagai relawan, donatur, atau mitra kerja.

Membangun kepercayaan publik dilakukan dengan **diseminasi Kepalangmerahan yang efektif mengenai prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk peran dan mandat, serta terutama hasil capaian kegiatan kemanusiaan PMI.** Melalui diseminasi, PMI dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kegiatan kemanusiaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. **Undang-undang No. 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi landasan bagi PMI** dalam memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan lainnya yang terjadi akibat konflik. PMI akan terus aktif melakukan advokasi agar HHI dihormati dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. PMI akan memastikan kode perilaku organisasi dipatuhi semua komponen PMI sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip organisasi untuk membantu mencegah terjadinya pelanggaran etika dan melindungi reputasi organisasi.

Menghadapi **kompleksitas krisis kemanusiaan yang semakin beragam, PMI memanfaatkan diplomasi kemanusiaan untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia.** Melalui mediasi dan dialog, PMI berkerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan layanan kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan.

Misi kedua ini, secara spesifik mengacu pada amanat Pasal 22, butir c, d, e, Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan Strategis 4-6.

3. Memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, swasta, mitra gerakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk layanan kemanusiaan yang berkelanjutan

Netralitas dan Kemandirian merupakan bagian dari tujuh Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang menjadi landasan integritas Perhimpunan Nasional. PMI menyadari bahwa kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan layanan kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi sebagai *auxiliary role* penyelenggaraan Kepalangmerahan, PMI terus mengedepankan kolaborasi dengan berbagi pihak dan menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mendukung layanan kepalangmerahaan yang efektif dan berkelanjutan.

Penggalangan dana merupakan salah satu kunci keberhasilan layanan kemanusiaan yang berkelanjutan yang memungkinkan PMI untuk merencanakan program-program jangka panjang dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang terdampak bencana, krisis kesehatan, krisis sosial dan krisis kemanusiaan lainnya. Melalui kerjasama dan kolaborasi, berbagai pihak dapat menggabungkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya lainnya.

Setiap pihak memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda. Dengan saling melengkapi, kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif, serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap program-program kemanusiaan yang dijalankan oleh PMI. Selain itu, kolaborasi yang kuat dapat membantu jejaring sehingga **memudahkan koordinasi dan respon** terhadap berbagai situasi darurat, membantu **menghindari duplikasi program** dan **meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya**, serta **memperkuat kapasitas masyarakat lokal** untuk mengatasi masalah kemanusiaan secara mandiri.

Misi ketiga ini, mengacu pada semua tugas yang dimandatkan pada Pasal 2, Pasal 22, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan Strategis 7.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PMI 2024-2029



Rencana Operasional PMI Tahun 2024-2029



TUJUAN STRATEGIS-3

(Tujuan Jangka Panjang)

Membangun **kesiapan organisasi** untuk memastikan **layanan PMI** dalam menghadapi **situasi konflik**



OUTCOME 3.1

(Hasil Jangka Menengah)

Tata kelola organisasi dalam menyediakan **layanan Kepalangmerahan dalam situasi konflik**, yang **inklusif** dengan berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional dan panduan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah



OUTCOME 3.2

(Hasil Jangka Menengah)

Penerimaan dan dukungan dari para pihak yang berkonflik terhadap **layanan Kepalangmerahan** tetap terjaga

TUJUAN STRATEGIS-4

(Tujuan Jangka Panjang)

Membangun **kapabilitas sumber daya manusia** yang unggul melalui pembinaan dan sertifikasi terstruktur untuk mencapai layanan yang optimal



OUTCOME 4.1

(Hasil Jangka Menengah)

Profesionalisme dan **kompetensi Sumber Daya Manusia PMI** menguat dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kepalangmerahan



OUTCOME 4.2

(Hasil Jangka Menengah)

Pelibatan aktif komponen PMI dalam **pengembangan manajemen karir** dan **portofolio individu** menguat untuk mendukung penciptaan lingkungan kerja yang aman



OUTCOME 4.3

(Hasil Jangka Menengah)

Kapabilitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) meningkat sebagai **Pusat Unggulan (center of excellence)** dalam pengelolaan Sumber Daya PMI

TUJUAN STRATEGIS-5

(Tujuan Jangka Panjang)

Meningkatkan **transparansi dan akuntabilitas organisasi** untuk layanan kemanusiaan yang berkelanjutan



OUTCOME 5.1

(Hasil Jangka Menengah)

Implementasi dan mekanisme pengawasan produk hukum terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku



OUTCOME 5.2

(Hasil Jangka Menengah)

Penguatan fungsi kemarkasan untuk optimalisasi layanan kemanusiaan yang mematuhi standar akuntabilitas dan transparansi



OUTCOME 5.3

(Hasil Jangka Menengah)

Kapabilitas organisasi menguat untuk memenuhi **akuntabilitas organisasi**

TUJUAN STRATEGIS-6

(Tujuan Jangka Panjang)

Meningkatkan **peran aktif PMI** dalam **diplomasi kemanusiaan** sebagai strategi mempengaruhi kebijakan terkait layanan kemanusiaan dan menyebarkan layanan Kepalangmerahan kepada masyarakat, di tingkat nasional dan global



OUTCOME 6.1

(Hasil Jangka Menengah)

Strategi diplomasi kemanusiaan dilaksanakan sebagai upaya advokasi kebijakan untuk layanan Kepalangmerahan yang inklusif dan berkelanjutan



OUTCOME 6.2

(Hasil Jangka Menengah)

Optimalisasi publikasi dan edukasi tentang **peran dan kontribusi PMI** dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan

TUJUAN STRATEGIS-7

(Tujuan Jangka Panjang)

Meningkatkan peran aktif PMI dalam mewujudkan **kemitraan strategis** dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan **diversifikasi sumber daya**, dan memberikan **layanan** kemanusiaan yang **inovatif dan berkelanjutan**



OUTCOME 7.1

(Hasil Jangka Menengah)

Peran aktif PMI meningkat dalam **kemitraan strategis** yang dinamis, terarah dan terukur



OUTCOME 7.2

(Hasil Jangka Menengah)

Kapasitas manajemen kemitraan meningkat untuk mendukung terciptanya diversifikasi keahlian (sumber daya) dan pendanaan